



**PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENANAMAN MODAL SEBAGAI
TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

DAFFA ARDHYAWIANSYACH

NIM. 11000119140377

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENANAMAN MODAL SEBAGAI
TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
gunamenyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

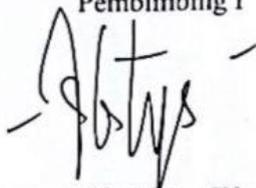
Oleh :

DAFFA ARDHYAWIANSYACH

NIM. 11000119140377

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum.
NIP. 196009261986032001

Pembimbing II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP. 198303202008122002

HALAMAN PENGUJIAN

**PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENANAMAN MODAL SEBAGAI TINDAK
LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

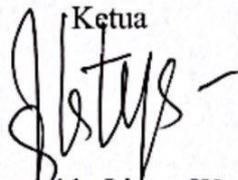
DAFFA ARDHYAWIANSYACH

NIM. 11000119140377

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 September 2023

Dewan Penguji

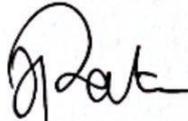
Ketua



Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum

NIP. 196009261986032001

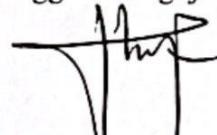
Anggota Penguji I



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP. 198303202008122002

Anggota Penguji II



Indarja, S.H., M.H.

NIP. 196203221987031003

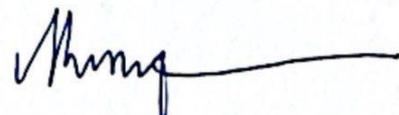
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S-1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 01 September 2023



Daffa Ardhyawiansyah

NIM. 11000119140377

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pelaut yang tangguh tidak lahir di laut yang tenang.”

Penulisan hukum ini dipersembahkan bagi kedua orang tua, adik, dan keluarga besar saya, seluruh orang yang saya cintai dan orang yang mencintai saya, serta seluruh pembaca atas kesediaannya telah berkenan untuk meluangkan waktu membaca tulisan ini. Persembahan penulisan hukum ini juga didedikasikan bagi Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang dapat terangkai indah selain penulis haturkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui limpahan rahmat, karunia, serta kuasa-Nya telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati bagi penulis dari awal penyusunan hingga sampai telah diselesaikannya secara baik suatu penulisan Skripsi ini dengan judul, **“Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanaman Modal Sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum guna mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Penulis sangat bersyukur bahwa selama proses penyusunan Skripsi ini, tidak semata-mata hal tersebut dihasilkan dari jerih payah penulis sendiri, akan tetapi berasal dari dukungan serta sumbangsih baik secara teoretis maupun praktis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani S.H., M.Hum. dan Dr. Ratna Herawati. S.H., M.H. yang selama ini dengan penuh kesabaran dan tanpa lelah membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung proses penyusunan skripsi ini.

Semarang, 01 September 2023

Penulis,

Daffa Ardhyawiansyach

ABSTRAK

Salah satu pemicu terjadinya konflik dalam bidang investasi yaitu adanya konflik regulasi, dikarenakan konflik ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memayungi secara memadai di bidang penanaman modal. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui tindak lanjut pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun peraturan daerah tentang penanaman modal terkait dengan disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menyusun peraturan daerah tentang penanaman modal sebagai implikasi dari disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini yaitu Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai klarifikasi atas data sekunder.

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini yaitu menunjukkan bahwa kegiatan investasi berupa Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dibawah oleh banyak lembaga yang membuat Panjang birokrasi-nya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mendukung program percepatan pembangunan nasional melalui pengaturan baru guna menciptakan keamanan, kenyamanan, kelancaran bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan tahun 2022 menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, yang kemudian sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai kewenangan di bidang pelayanan penanaman modal yang semula didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal sebagai Lembaga Teknis Daerah yang secara administrasi menjadi tugas Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini beralih pendelegasiannya kepada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi di Indonesia, khususnya provinsi Jawa Tengah, maka perlu adanya upaya perbaikan terhadap kelemahan koordinasi antara instansi terkait melalui peningkatan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kata Kunci: *Cipta Kerja, Omnibus Law, Provinsi Jawa Tengah, Penanaman Modal, Peraturan Daerah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kerangka Pemikiran.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. <i>Omnibus Law</i>	16
B. <i>Omnibus Law</i> di Indonesia.....	18
C. Sejarah Penanaman Modal	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

A.	Pengaturan mengenai Penanaman Modal sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	29
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	29
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	31
3.	Penanaman Modal Asing (PMA)	33
B.	Tindak Lanjut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Menyusun Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal setelah Disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	44
1.	Kondisi Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah.....	56
2.	Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanaman Modal sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	61
C.	Kendala dan Upaya yang Dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Menyusun Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal terkait dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	82
1.	Kendala Internal.....	83
2.	Kendala Eksternal.....	83
3.	Upaya Internal.....	85
4.	Upaya Eksternal	86
BAB IV	PENUTUP	87

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Infrastruktur Bandara dan Pelabuhan.....	60
Gambar 3.2	Infrastruktur Tol Trans Jawa.....	61
Gambar 3.3	Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	61
Gambar 3.4	Kawasan Industri.....	62
Gambar 3.5	Jalur Kereta Api.....	62
Gambar 3.6	Penyusunan Prolegda/Program Pembentukan Perda.....	70
Gambar 3.7	Mekanisme Penyusunan Prolegda di Lingkup DPRD.....	71
Gambar 3.8	Penetapan Prolegda/Program Pembentukan Peraturan Daerah....	72